

KEKUASAAN POLITIK MENURUT NICCOLO MACHIAVELLI**Uliraja Simarmata¹, Yohanes Anjar Donobakti²**^{1,2}Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, MedanEmail: johanesadb2015@gmail.com**ABSTRAK**

Kekuasaan politik merupakan bagian integral hidup manusia, yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Namun sering menjadi masalah: bagaimana menerapkannya secara benar? Banyak ahli mencoba mengungkapkan buah pikirannya. Salah satu di antaranya adalah Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli tampaknya lebih menekankan metode atau cara-cara penggunaan kekuasaan politik. Dia berpendapat bahwa politik pada hakikatnya merupakan kekuasaan. Ditandaskannya bahwa kekuasaan harus menjadi sarana ampuh untuk mengatur kepentingan negara. Kepentingan negara menjadi prioritas yang mampu menyisihkan semua kepentingan-kepentingan lainnya. Sehubungan dengan itu, Machiavelli berpandangan bahwa segala tindakan, baik itu bersifat kriminal, amoral, licik, jahat maupun kejam, yang dilakukan oleh seorang penguasa, adalah sah bila tujuannya untuk kepentingan negara.

Kata Kunci: *kekuasaan, politik, Niccolò Machiavelli, metode penggunaan kekuasaan, politik sebagai kekuasaan, penguasa, tujuan menghalalkan segala cara*

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang kekuasaan politik selalu merupakan pembicaraan yang aktual, sebab kekuasaan politik berperan penting dalam mengatur hidup manusia dalam bernegara. Konsep tentang kekuasaan politik banyak dibicarakan, karena definisi dan interpretasinya berbeda-beda. Akhir-akhir ini muncul tanda-tanda bahwa ilmu politik telah mengalami pergeseran nilai, dari suatu ilmu yang tadinya memusatkan geseran perhatian pada kepentingan negara, menjadi suatu ilmu yang memusatkan perhatian pada kekuasaan.

Dalam bukunya *Il Principe*, Niccollo Machiavelli mengatakan bahwa politik adalah kekuasaan. Pandangan ini memberikan peluang yang berbahaya bagi timbulnya diktatorisme. Penguasa akan gampang bertindak otoriter demi suatu tujuan yang dianggapnya penting.

Sebenarnya politik tidak identik dengan kekuasaan. Politik adalah kemahiran untuk mengatur dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan kekuasaan hanyalah merupakan salah satu unsur dari politik. Melihat hal itu, adalah menarik untuk mendalami lebih jauh ajaran Machiavelli tentang kekuasaan politik.

PEMBAHASAN**1. Riwayat Hidup dan Karya-Karya Machiavelli**

Niccolo Machiavelli adalah seorang negarawan dan politikus praktis. Ia lahir di kota Florence, di jazirah Italia pada tanggal 3 Mei 1469 semasa pemerintahan Lorenzo Agung (1464-1492). Ayahnya bernama Bernardo Machiavelli, ahli hukum yang bekerja

di kantor pajak pemerintah. Keluarga Machiavelli merupakan keturunan bangsawan. Kehidupan pribadi Niccolo Machiavelli sangat sedikit diketahui. Pada tahun 1502, ia menikah dengan Marietta Corsini yang kelak memberinya enam orang anak. Akhirnya pada tanggal 20 Juni 1527, Niccolo Machiavelli meninggal dunia.

Latar Belakang Pemikiran

Pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan politik bertitik tolak dari pengalamannya. Situasi kekuasaan politik yang tidak stabil dan perselisihan-perselisihan yang timbul di kalangan penguasa gereja dan raja-raja, membuatnya bosan. Karena itu, ia menuju suatu kepemimpinan sekuler.

Pengaruh Renaissance

Machiavelli hidup pada zaman Renaissance. Peristiwa-peristiwa yang dialaminya pada jaman Renaissance ini memengaruhi pemikirannya tentang kekuasaan politik. Machiavelli juga mengalami tradisi kekuasaan Yunani yang dilanda legitimasi religius. Pada tradisi kekuasaan Yunani, kekuasaan menjadi suatu wadah organisasi rasional yang mengusahakan kepentingan bersama. Di samping itu, ia juga mengalami kekuasaan yang menjadi sarana efektif menegakkan keadilan. Hukum menjadi alat kontrol terhadap tindak tanduk penguasa dari kesewenang-wenangan. Maka ketika ia aktif di panggung kekuasaan, dapat dikatakan bahwa legitimasi religius sudah dihapuskan dari kekuasaan. Dia hanya mengalami legitimasi moral, oleh karena itu terjadi anarki politik dan moral. Il Principe Machiavelli menjadi pendobrak legitimasi moral. Apa yang disaksikannya dalam masa Renaissance membentuk pemikirannya dan dituangkan dalam Il Principe. Wajah tidak hanya wajah yang bersih, suci, murni, sopan, tetapi juga wajah yang licik, kotor, berdarah dan garang sebagaimana wajah manusia biasa. Wajah manusia yang penuh ambisi senantiasa diliputi kegelisahan dan keresahan. Hal ini mengarahkan manusia untuk mewujudkan ambisinya menjadi kenyataan.

Pergolakan Politik di Florence

Pada masa kekuasaan Lorenzo Agung (1464-1492), Machiavelli lahir dan dibesarkan. Situasi politik yang dialaminya baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemikirannya. Selama selang waktu tiga puluh tahun pada masa Machiavelli, terjadi beberapa kali pergantian pemimpin negara Florence. Sampai usia dua puluh tujuh tahun dia berada di bawah kekuasaan Lorenzo Agung. Situasi politik yang disaksikannya mendorongnya terjun untuk memperbaiki ketidakstabilan politik negara Florence.

Lorenzo Agung meninggal dunia pada tanggal 9 April 1492. Tahta kekuasaan berpindah ke tangan putera sulungnya Pietro de Medici. Pada masa pemerintahan Pietro de Medici ini suasana politik negara Florence tidak stabil. Pada waktu itu juga timbul gerakan reformasi spiritual di bawah pimpinan biara Dominikan Girolamo Savoranola. Masa pemerintahan Pietro de Medici hanya bertahan dua tahun. Pada tahun 1494 kekuasaan tertinggi Florence berpindah ke tangan Savoranola.

Machiavellian mengalami dan menyaksikan pergolakan politik masa itu. Dia menyaksikan masa kejayaan dan keruntuhan kekuasaan keluarga Medici. Dia juga menyaksikan kekuasaan yang tidak didukung rakyat biasa. Sebaliknya dia mengalami kekuasaan Savoranola yang bersifat teosentris. Bagi Machiavelli pola pemerintahan yang menggabungkan kekuasaan dan moral, merupakan suatu yang a-historis. Menurut dia, pemerintahan seperti itu tidak sesuai lagi. Machiavelli juga melihat dan mengalami bahwa kesadaran politik rakyat biasa sangat tidak stabil dan gampang dipengaruhi oleh

permainan politik golongan kapitalis. Padahal kestabilan politik dan kekuasaan perlu untuk mencapai suatu negara yang aman. Kekuasaan politik yang stabil hanya dialaminya waktu pemerintahan Lorenzo Agung. Semua kejadian kejadian politik itu tidak luput dari pengamatannya, dan semua pengalaman itu meninggalkan kesan yang mendalam baginya.

Ketika Soderini menduduki tahta kekuasaan. Machiavelli ikut aktif dalam panggung politik. Dia menjadi orang kepercayaan Soderini. Selama kepemimpinan Soderini, Machiavelli berkembang menjadi seorang politikus praktis. Ia berperan aktif dibidang diplomasi. Dalam misi diplomasi, dia banyak belajar dari pengalaman politik negara yang dikunjunginya, Pengaruh diskusi dan kunjungannya dengan pemimpin-pemimpin negara lain menambah semangat kecintaannya kepada negaranya. Lebih-lebih hasil tukar pikirannya dengan Caesar Borgia menjadikan semangat dan kecintaannya pada negara tidak terbatas pada Florence saja. Ia bercita-cita untuk mencapai suasana Italia baru sebagai bentuk Renaissance dari kekaisaran Romawi. Machiavelli sangat terkesan atas kepemimpinan Caesar Borgia, sehingga menjadi inspirasi baginya dalam menyusun bukunya yang terkenal, *Il Principe*.

Empat belas tahun Machiavelli aktif di panggung kekuasaan yang dipimpin Soderini. Pada tahun 1512 terjadi lagi perebutan kekuasaan di Florence. Tentara Spanyol yang jauh lebih kuat menyerang tentara Florence. Rakyat dan Florence ketakutan ketika tentara Spanyol mulai mengancam. Mereka tidak suka perang. Soderini digulingkan dari tentara kekuasaannya dan kekuasaan diserahkan kepada keluarga Medici lagi. Berakhirlah republik Florence, dan berakhir juga karier politik Machiavelli. Suatu karier yang dia senangi dan ingin dilanjutkannya setelah keluarga Medici berkuasa. Pengalaman dan keinginannya duduk dipanggung kekuasaan memacunya untuk menulis *Il Principe*.

Garis Besar Pandangannya

Pandangan Machiavelli tentang politik dan kekuasaan Ia tidak bertanya, "Bagaimana ilmu politik yang sebenarnya?" berbeda dengan pendahulu-pendahulunya. ia lebih suka bertanya, "Peraturan apa yang dapat pernah tetapi dikumpulkan dari sejarah dan pengalaman untuk menentukan kita di yang sini dan sekarang?"

Maka politik baginya adalah hal praktis dan jawabannya lebih merupakan masalah prinsip ketimbang observasi praktis adalah sebuah kejutan. Bagi Machiavelli tidak realistis bila penguasa perlu baik hati. Kadang-kadang mereka itu harus jahat. Karena itu penguasa harus dapat menggunakan segala cara untuk menjamin kelanggengan kekuasaannya. Maka ia memisahkan kekuasaan dari kebajikan.

Menurut Machiavelli moral dan politik harus dipisahkan. karena tidak ada hubungannya satu sama lain. Ia menekankan bahwa dalam urusan politik, apa saja yang memperkuat kekuasaan adalah halal. Karena itu segala sesuatu yang menyukkseskan kekuasaan dapat dibenarkan. Menurutnya, tidak ada gunanya mempersoalkan legitimasi moral, tetapi yang menentukan adalah kekuasaan berdasarkan teknik dan taktik. Tujuan politik adalah mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Legitimasi kekuasaan membenarkan segala teknik manipulasi dukungan masyarakat terhadap kekuasaan yang ada.

Menurutnya, politik yang ideal menuntut adanya orang kuat yang berkuasa. Kekuatan merupakan kebijaksanaan untuk menentukan jalan politik dan kekuasaan negara. Untuk itu, seorang penguasa harus mengetahui batas kemampuannya. Penguasa harus dapat menggunakan situasi yang baik untuk bertindak. Penguasa dituntut untuk jeli melihat suasana dan aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan praktek kekuasaan politik, penguasa tidak perlu dihalangi pertimbangan-pertimbangan moral. Segala

perbuatan penguasa menjadi halal dalam mempertahankan kekuasaan, baik tindakan yang paling keji sekalipun. Dalam hal inilah dia ditudu menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Machiavelli berpendapat bahwa setiap penguasa perlu memiliki angkatan perang yang kuat dan berdisiplin. Angkatan perang yang dimaksudkannya adalah angkatan perang sendiri, sebab, angkatan perang sendiri lebih terjamin dalam mempertahankan kekuasaan. Menurutnya, angkatan perang yang demikian mutlak ada untuk mempertahankan kekuasaan para penguasa. Karena itu, Machiavelli memperkenalkan doktrin wajib militer bagi semua warga negara dalam situasi darurat perang.

Selain hal di atas Machiavelli juga memandang agama dari nilai politis. Agama mempunyai nilai politis yang kuat dan berpengaruh. Agama merupakan suatu alat yang ampuh untuk meraih kepatuhan masyarakat. Machiavelli menunjuk nilai politis agama yang paling utama adalah mampu membangun dan membentuk sikap manusia menjadi tulus, setia, patuh dan bersatu. Karena itu agama sangat penting untuk penguasa dalam mengendalikan masyarakat yang dipimpinnya. Penguasa harus pandai menjunjung prinsip-prinsip dasar agama dihidupi warganya. Penguasa juga harus memelihara dan memberi semangat terhadap segala tindakan yang memungkinkan dan menolong untuk tujuan politis. Tetapi penguasa harus sadar bahwa itu semua adalah suatu taktik untuk memanipulasi rakyat.

2. Kekuasaan Politik dan Negara

Kekuasaan

Arti Kekuasaan

Kekuasaan itu seperti halnya cinta, lebih mudah dialami daripada didefinisikan. Secara umum kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan atau wewenang untuk menguasai orang lain, memaksa dan mengendalikan orang lain sampai orang lain patuh, mencampuri kebebasannya dan memaksakan tindakan-tindakan dengan cara-cara yang khusus.

Sesuai dengan definisi umum kekuasaan di atas, Machiavelli menghubungkan kekuasaan dengan negara. Menurut dia, kekuasaan adalah sarana atau alat yang harus mengabdikan kepada kepentingan negara itu sendiri. Kepentingan negara harus didahulukan, karena itu penguasa harus memahami dengan baik apa yang perlu dan harus dilakukan demi kepentingan negara. Kekuasaan harus digunakan oleh penguasa untuk menyelamatkan dan mempertahankan kehidupan dan kemerdekaan negara. Menurut Machiavelli, negara harus mengejar kepentingannya sendiri demi kejayaan dirinya dalam hubungan dengan *raison d'etat* dan bukan dalam hubungan dengan hal-hal di luar dirinya, pengaruh yang sehingga kekuasaan pun harus bersih dari bersifat ekstrapolitik yang dapat meruntuhkan dan menghancurkan negara. Negara dan kekuasaan harus bebas dari nilai-nilai etis, kultural dan religius. Maka Machiavelli menempatkan kekuasaan sebagai dasar negara yang utama. Dia mengemukakan ada dua dasar negara yaitu hukum dan kekuasaan. Dari kedua dasar negara itu.

Sumber Kekuasaan

Kekuasaan dapat bersumber dari berbagai segi. Ada yang berpendapat bahwa kekuasaan dapat bersumber dari Tuhan, dari kepercayaan, dari kekuatan fisik, dari harta, kedudukan dan jabatan. Machiavelli mengetahui pendapat umum ini, tetapi ia tidak menganut salah satu dari pendapat tersebut. Menurut Machiavelli, satu-satunya sumber kekuasaan adalah negara dan segala kepentingannya. Oleh sebab itu negara selaku

sumber kekuasaan harus memiliki kedudukan, kedaulatan dan kewibawaan tertinggi. Negara sebagai sumber kekuasaan harus memperoleh tempat yang terhormat. Dengan demikian, barulah kekuasaan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, tetapi dalam hubungan dengan *raison d'etat*.

Kekuasaan Despotik

Despotik berasal dari bahasa Yunani *despotike (of a master)*, artinya "penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan seorang tuan terhadap budaknya." Istilah ini dipakai untuk menyatakan bentuk pemerintahan dalam negara yang rajanya mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak mempertanggungjawabkannya kepada siapa pun. Despotik adalah salah satu di antara bentuk-bentuk yang penyelenggaraan kekuasaan yang paling kuno. Penguasa memerintah dengan cara despotik memegang semua kekuasaan tetapi kekuasaan itu dipakai untuk kepentingan negara. Machiavelli menganjurkan cara despotik ini dengan bertitik tolak dari situasi negara Florence pada masa itu. Machiavelli menganjurkan penyelenggaraan kekuasaan dengan cara despotik, tetapi harus diramu dan diperkaya dengan kepura-puraan, kelicikan, kejahatan, penghianatan demi kepentingan negara. Penyelenggaraan kekuasaan tidak boleh dipengaruhi nilai-nilai etis, kultural dan religius. Penyelenggaraan kekuasaan dengan cara despotik tidak memberi tempat pada cara penyelenggaraan kekuasaan paternalistik yaitu penyelenggaraan kekuasaan yang penuh perhatian dan belas kasihan kepada warganya. Menurut Machiavelli belas kasihan membuat penguasa dan kekuasaannya tidak dapat mempertahankan kelanjutan eksistensinya. Belas kasihan merupakan kelemahan yang membahayakan kekuasaan.

Politik

Arti Politik

Politik berasal dari kata Yunani *Ta Politica* yang berarti "segala hal atau urusan yang berhubungan dengan polis", sedangkan polis adalah "desa, kota atau negara. Jadi politik dalam arti umum dapat diartikan sebagai "setiap aktivitas untuk kesejahteraan umum atau masyarakat". Sesuai dengan pengertian umum ini, Machiavelli dalam *Il Principe* menghubungkan politik dengan kekuasaan. Dia menyatakan bahwa kekuasaan dan politik berjalan seiring.

Tujuan Politik

Politik Tujuan politik pada dasarnya adalah *bonum commune* yakni segala yang baik menguntungkan secara bersama sama. Politik tidak mempunyai arti dan nilai kalau tujuannya bukan *bonum commune*. Tujuan politik seperti itu tidak diterima Machiavelli. Baginya politik bertujuan untuk memperluas dan memperkuat kekuasaan. Hal ini dapat kita lihat dalam *Il Principe*. Untuk sampai kepada tujuan itu, Machiavelli menganjurkan segala cara dan tipu muslihat. Legitimasi kekuasaan memberikan segala tehnik manipulasi dukungan masyarakat terhadap kekuasaan yang ada. Untuk itu, penguasa tidak bisa bertindak setengah-setengah, ragu-ragu, tetapi harus berani dan tegas.

Kekuasaan Politik

Menurut Machiavelli politik merupakan sarana untuk melancarkan kekuasaan. Dalam hal ini, pengertian kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya dengan tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari

kekuasaan sosial. Kekuasaan politik yang terfokus pada negara merupakan satu-satunya pihak yang berwenang dan yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh kekuatan dari masyarakatnya, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administrasi, legislatif, dan yudikatif. Karena itu kekuasaan politik tidaklah mungkin tanpa penggunaan kekuasaan. Apabila penggunaan kekuasaan berjalan dengan efektif, kekuasaan dapat disebut sebagai kontrol. Maka untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada penguasa, yaitu pelaku yang menjalankan kekuasaan. Di samping penguasa harus juga ada alat atau sarana (*machtsmiddelen*) agar penggunaan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan baik.

3. Politik dan Agama

Agama sebagai kekuatan moral dalam masyarakat harus bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang sangat dominan, seperti lembaga politik. Agama tidak luput dari suasana politik masyarakat. Agama juga tidak cuci tangan terhadap urusan politik, sejauh politik diartikan sebagai keterlibatan pada masalah masyarakat (*polis*), seperti: kemiskinan dan penindasan. Keterlibatan itu tidak bertentangan dengan tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Nilai-nilai keagamaan mempunyai pengaruh penting bagi budaya politik dan menyebabkan masyarakat cenderung mengikuti pola-pola tertentu dalam kehidupan politik.

Pandangan Machiavelli tentang Agama

Pandangan Machiavelli terhadap agama dilatarbelakangi oleh agama Romawi Kuno. Pada zaman Romawi Kuno, agama berperan sebagai pengontrol gejolak sosial dan memberikan banyak inspirasi bagi tentara Romawi Kuno. Agama Romawi Kuno sangat mendukung manusia yang berani dan penuh aksi. Machiavelli memuji tindakan Romulus, yang terdapat dalam mitos agama Romawi Kuno. Romulus membunuh saudara kandungnya demi merebut serta mempertahankan kekuasaan dan stabilitas negaranya. Machiavelli mengidolakan Romulus yang kuat dan mampu meraih apa yang dicita-citakannya. Romulus meraih kekuasaan mempertahankannya selama mungkin. Romulus pada dasarnya egoistis dan tidak mudah ragu-ragu. Karakter seperti inilah yang didukung praktek agama pada masa itu. Machiavelli melihat bahwa pada jaman Romawi Kuno, agama sangat membantu pengontrolan angkatan bersenjata, menyemangati rakyat, melahirkan manusia yang baik dan menumbuhkan rasa malu terhadap yang jahat. Di mana ada agama, di situ orang sangat mudah diajak untuk mengangkat senjata, tetapi di mana ada senjata, di situ tidak ada agama dan penggunaan senjata sulit diperkenalkan. Agama merupakan salah satu aspek keberhasilan dan kegemilangan kekuasaan Romawi Kuno. Agama membuahkan institusi-institusi yang baik yang mengarahkan masyarakat pada keadaan yang baik dan kepada kebahagiaan.

Agama demi Kepentingan Kekuasaan Politik

Machiavelli mempolitisir kehidupan dan nilai-nilai agama. Menurutnya nilai-nilai agama harus digali demi kepentingan penguasa dalam mempertahankan dan mengembangkan kekuasaannya. Jika negara mampu mempengaruhi rakyat seperti yang dibuat Romulus dan Numa pada zaman Romawi Kuno, akan diperoleh keuntungan besar. Karena itu, agama harus dipelihara sedemikian rupa dalam negara dan ditempatkan dalam hirarki nilai politis yang utama. Agama dapat membangun dan membentuk sikap

manusia menjadi tulus, taat, setia dan supaya bersatu. Penguasa harus pintar memanfaatkan itu, nilai politis agama dapat diperoleh dari rakyat. Penguasa harus menempatkan agama secara istimewa dalam negara, tetapi bukan karena kebenaran agama, melainkan karena nilai politis yang dimilikinya.

Nilai politis agama sangat berpengaruh untuk melancarkan kekuasaan politik. Karena itu Machiavelli menyesali kehidupan religius masyarakat Italia pada waktu ia hidup, yang dianggapnya sedang mengalami kemerosotan moral. Kemerosotan moral waktu itu mengacaukan bangsa Romawi Kuno. Menurut Machiavelli kemerosotan itu disebabkan oleh dua hal, yakni: pertama, skandal-skandal yang dilakukan oleh para pangeran gereja. Skandal itu menyebabkan disintegrasi moral publik dan situasi khaos dalam kehidupan beragama. Teladan yang jelek dari pemuka-pemuka agama memadamkan sifat patriotisme dari pemeluk agama; kedua, terjadinya kekeliruan dalam interpretasi penghayatan agama kristen. Agama kristen diinterpretasikan dan dihayati sebagai lemah lembut dan rendah hati. Penghayatan ini juga tidak menumbuhkan patriotisme. Menurut Machiavelli sebenarnya yang dibutuhkan dari agama kristen adalah kekuatan yang mampu membangkitkan semangat rakyat.

Sesuai dengan pengamatannya, Machiavelli mengemukakan gagasannya mengenai agama-agama secara pragmatis dan sekuler. Dalam mempertahankan kekuasaan politik dan negara, agama harus tunduk kepada negara. Dalam konteks politik, bukan cinta kasih yang harus ditonjolkan tetapi peranan agama sebagai faktor integrasi suatu negara. Menurut kesaksian sejarah, agama memainkan peranan penting dalam mempersatukan negara. Dalam panggung politik, hanya orang kuat mampu mempertahankan pemerintahan, sedangkan yang lemah akan melarikan diri dan mencari hiburan-hiburan pada hal-hal rohani dalam agama. Penguasa yang lemah juga sering membuat rasionalisasi atas kelemahan-kelemahannya. Machiavelli berusaha membuat agama itu berguna secara pragmatis dengan rasionalisasi atas yang cara mengadakan reformasi religius. Agama harus menjadi sarana pembakar semangat patriotisme masyarakat dan berperan sebagai pendukung lembaga-lembaga publik sehingga ketertiban masyarakat dapat terjamin. Kesatuan masyarakat harus ditopang oleh agama.

KESIMPULAN

Pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan politik muncul karena situasi politik pada jamannya. Ajarannya ditujukan untuk mengatasi situasi politik yang khaos waktu itu. Machiavelli melihat keadaan darurat dialami sebagaimana Italia pada masa itu. Karena itu, kekuasaan yang goyah dan politik rapuh harus distabilkan, agar dapat menjadi sarana untuk memperbaiki sistem yang khaos. Menurut Machievelli, untuk mencapai stabilitas, penguasa harus benar-benar berkualitas, terampil dan cerdik. Penguasa harus dapat berperan ganda, yaitu seperti manusia dan seperti binatang. Binatang yang dimaksud Machiavelli adalah singa dan rubah.

Menurut Machiavelli sungguh tidak realistis jika para penguasa itu hanya tahu berbuat baik saja. Ia menganjurkan penguasa untuk berbuat jahat apabila memang sungguh-sungguh dibutuhkan. Perlakuan jahat itu harus dilakukan tanpa dibebani rasa bersalah. Berkenaan dengan hal di Machiavelli menganjurkan agar politik dipisahkan dari agama, etika dan moral. Menurutnya politik, etika, agama dan moral harus independen, mandiri dan tidak saling tergantung. Politik harus dijalankan secara murni. Kekuasaan selaku alat politik yang paling ampuh harus menjadi pengabdian utama

kepentingan negara. Sedangkan agama, etika dan moral secara politis hanya bermanfaat kalau memiliki nilai dan semangat dalam mengabdikan kepentingan negara.

Machiavelli adalah seorang pemikir yang pandangan-pandangannya sering dianggap menyimpang dari suara hati yang normal. Walaupun demikian, pandangannya tersebut dipraktekkan secara sembunyi-sembunyi oleh banyak penguasa negara, entah sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan.

Sejak ajaran Machiavelli dipublikasikan, Machiavellianisme selalu mempunyai arti penting di kalangan politik dan diplomatik. Meskipun banyak orang menolaknya secara teoritis, tetapi sebenarnya mereka telah memperoleh hasil yang baik dari ajarannya. Dapat dikatakan *Il Principe* telah dibaca dan dipraktekkan oleh banyak raja, yang berusaha menegakkan kekuasaan absolut dalam abad ke-16 dan dalam abad-abad berikutnya. Ajaran Machiavelli telah meninggalkan pengaruh yang kuat bagi para penguasa. Banyak penguasa, baik secara sadar atau tidak, mempraktekkan nasehat-nasehat Machiavelli yang terdapat dalam *Il Principe*.

DAFTAR PUSTAKA

- Machiavelli, Niccolò. *The Discourses*. London: Penguin Books, 1969.
- _____. *The Prince*. New York: Oxford University Press, 1984.
- _____. *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik (judul asli Il Principe)*. Diterjemahkan oleh C. Woekirsari. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Copleston, F. "Late Medieval and Renaissance of Philosophy – Part II." Dalam *A History of Philosophy*, Vol. III, 128–134. New York: Image Books, A Division of Doubleday & Company Inc., 1963.
- New Catholic Encyclopedia*, Vol. IX, 31–34. America: Jack Heraty & Associates, Inc., Palatine, Illinois, 1981.
- Raper, J. H. *Filsafat Politik Machiavelli*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rohman, Z. A. "Machiavelli dan Kekuasaan: Peranan Obsesi dalam Pikiran Politik," dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. IV, 99–104. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Skinner, Quentin. *Machiavelli: Dilema Kekuasaan dan Moralitas*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.
- Von Schmid, J. J. "Niccolò Machiavelli (1469–1527)." dalam *Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum dari Plato sampai Kant*, 133–143. Jakarta: P.T. Pembangunan, 1959.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum: Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Magnis-Suseno, F. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1988.